



Implementasi Program UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato

Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato

Sintia Mohamad¹, Gretty Syatriani Saleh^{2*}, Hasman Umuri³

¹²³ Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pohuwato

Email: sintiamohamad24@gmail.com, grettysyatrianisaleh1@gmail.com*,
umurihasman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Padengo, Kabupaten Pohuwato. Desa Padengo merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan signifikan terkait kemiskinan. Dalam konteks ini, program UMKM menjadi salah satu strategi yang diadopsi oleh Pemerintah Desa Padengo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mereduksi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petugas pemerintah, pemilik usaha UMKM, dan anggota masyarakat setempat. Data juga diperoleh melalui observasi langsung dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program UMKM di Desa Padengo telah memberikan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program-program ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan pelatihan serta dukungan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program UMKM, termasuk birokrasi yang kompleks, kurangnya akses terhadap modal dan pasar, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat dan peluang dari program UMKM di kalangan masyarakat. Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan efektivitas program UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Desa Padengo. Antara lain, penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan akses terhadap modal dan pasar, pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan implementasi program, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya UMKM dalam mengatasi kemiskinan.

Kata kunci: Implementasi Program; Pengentasan Kemiskinan; UMKM

Abstract

This research discusses the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) program in efforts to alleviate poverty in Padengo Village, Pohuwato Regency. Padengo Village is one area that still faces significant challenges related to poverty. In this context, the UMKM program is one of the strategies adopted by the Padengo Village Government to improve community welfare and reduce poverty levels. This research uses a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews with various stakeholders, including government officials, UMKM business owners, and local community members. Data was also obtained through direct observation and documentation studies. The results of the research show that the implementation of the UMKM program in Padengo Village has had a positive impact on poverty

alleviation efforts. These programs have encouraged local economic growth, created new jobs, and provided training and support for UMKM to improve their skills and productivity. However, this research also identified several challenges and obstacles faced in implementing UMKM programs, including bureaucracy complex issues, lack of access to capital and markets, and lack of understanding of the benefits and opportunities of the UMKM program among the community. Based on these findings, several recommendations are proposed to increase the effectiveness of the UMKM program in alleviating poverty in Padengo Village. Among other things, simplifying administrative procedures, increasing access to capital and markets, participatory approaches in program planning and implementation, as well as increasing public understanding and awareness of the importance of UMKM in overcoming poverty.

Keywords: Program Implementation, Poverty Alleviation, UMKM

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah yang krusial di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki populasi yang sangat tinggi, yang berdampak langsung pada permintaan kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk sandang, pangan, dan papan. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi merupakan realitas yang dihadapi oleh jutaan orang setiap harinya. Keluarga-keluarga miskin sering kali berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya terjebak dalam kondisi yang sama.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, hasil yang dicapai sering kali tidak memuaskan. Misalnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperkenalkan untuk memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga miskin, meskipun memberikan bantuan sementara, sering kali tidak cukup untuk mengatasi akar masalah kemiskinan. Dalam banyak kasus, bantuan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, ketidakmerataan distribusi sumber daya dan kesempatan di berbagai daerah di Indonesia juga menjadi tantangan besar.

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yang mencerminkan kekurangan materi pada sejumlah golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga secara langsung memengaruhi kesehatan, moral, dan rasa harga diri individu. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai ke pendidikan berkualitas, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di masa depan. Hal ini menciptakan

lingkaran setan di mana kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan moral yang memerlukan pendekatan yang holistik.

Di Indonesia, program penanggulangan kemiskinan telah ada sejak tahun 1945, dengan beberapa landasan hukum yang mengatur upaya tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 adalah beberapa contoh regulasi yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan program-program tersebut sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh Anderson, harus melibatkan berbagai aktor, termasuk pejabat, kelompok masyarakat, dan instansi pemerintah, untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Hanya dengan memahami dan menangani akar penyebab kemiskinan, kita dapat berharap untuk melihat perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan menjadi masalah yang krusial di negara berkembang seperti Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadikan tingkat populasi sangat tinggi sehingga menyebabkan naiknya permintaan pada kebutuhan hidup sehari-hari meliputi sandang, pangan, dan papan. Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh keluarga miskin. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (Rah Adi Fahmi et al., 2018) Di Indonesia program

penanggulangan kemiskinan memublik Indonesia tahun 1945. memiliki beberapa landasan hukum salah satunya ditegaskan dalam pembukaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tentang kemiskinan. Adapun beberapa landasan hukum tentang peneggulangan kemiskinan, antara lain :)1) UU Nomor 13 Tahun 2011. (2) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010. (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengetasan kemiskinan. Menurut pendapat Anderson (Pramono, 2020) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan suatu negara. Kebijakan penanggulangan kemiskinan (Tibyan, 2010) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Kebijaksanaan yang secara tidak langsung, mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin,
2. Kebijaksanaan yang secara langsung, mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan
3. Kebijaksanaan khusus, yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi fokus penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang telah diakui secara luas dalam upaya tersebut adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan sebagai pilar ekonomi yang tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga berfungsi sebagai sumber lapangan kerja yang krusial bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, di mana mayoritas usaha ini dikelola oleh individu atau keluarga dengan modal yang relatif kecil. Misalnya, di sektor makanan dan minuman, banyak usaha kecil yang dimulai dari dapur rumah dan berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Contoh sukses seperti usaha makanan khas daerah yang berhasil menembus pasar lokal dan nasional menunjukkan potensi luar biasa yang dimiliki UMKM. Dengan memanfaatkan keunikan produk lokal, UMKM tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, tetapi juga melestarikan budaya dan tradisi lokal. Ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya bangsa.

Namun, meskipun potensi UMKM sangat besar, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan dan riwayat kredit. Hal ini mengakibatkan banyak

usaha yang terpaksa beroperasi dengan modal yang sangat terbatas, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berinovasi dan memperluas usaha. Sebagai contoh, seorang pengusaha kecil yang memiliki ide produk inovatif mungkin tidak dapat mewujudkannya karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan ramah bagi UMKM.

Selain itu, aspek pemasaran juga menjadi tantangan signifikan bagi UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam memasarkan produk mereka, terutama di era digital saat ini. Misalnya, penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran masih kurang dimanfaatkan secara optimal oleh banyak UMKM. Padahal, media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa biaya yang tinggi. Dengan memberikan pelatihan tentang pemasaran digital dan strategi branding, pelaku UMKM dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing produk mereka di pasar. Keterampilan ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM, baik di tingkat lokal maupun global.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah dapat mengambil peran aktif dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui program *corporate social responsibility* (CSR) yang fokus pada pengembangan UMKM. Misalnya, perusahaan besar dapat menjalin kemitraan dengan UMKM untuk menyediakan akses ke pasar yang lebih luas, serta memberikan dukungan dalam hal teknologi dan manajemen usaha. Dengan cara ini, ekosistem UMKM dapat diperkuat, dan mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan.

Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan strategi yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan akses pembiayaan, penguasaan keterampilan pemasaran, dan kolaborasi yang sinergis antara berbagai pihak, potensi UMKM dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, UMKM tidak hanya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Walaupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya yang signifikan dalam perekonomian nasional, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang kompleks dalam meningkatkan kemampuan usaha. Kendala ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, dan saling berkaitan satu sama lain (Beatrice & Hertati, 2023; Yuwinanto, 2020) (Zhahirah et al., 2023). Misalnya, keterbatasan akses terhadap modal menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga menghambat

kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa akses terhadap modal bukan hanya sekadar masalah finansial, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam sistem keuangan yang ada.

Selain itu, penguasaan teknologi menjadi faktor penting yang mempengaruhi daya saing UMKM Di era digital saat ini, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih terjebak dalam metode tradisional dan kurang memiliki pengetahuan tentang digitalisasi. Misalnya, usaha kecil yang bergerak di bidang makanan sering kali hanya mengandalkan penjualan secara langsung tanpa memanfaatkan platform online. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan zaman (Melati et al., 2022; Pratama et al., 2023; Sujatmiko et al., 2022; Zhahirah et al., 2023).

Kendala lainnya yang sering dihadapi adalah masalah pemasaran. Banyak pelaku UMKM yang memiliki produk berkualitas tinggi, tetapi mereka kesulitan dalam memasarkan produk tersebut. Kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran yang efektif, baik secara offline maupun online, membuat produk mereka sulit bersaing di pasar. Misalnya, sebuah usaha kecil yang memproduksi kerajinan tangan mungkin memiliki produk yang unik dan menarik, tetapi tanpa strategi pemasaran yang jelas, produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan bimbingan dalam merancang strategi pemasaran yang tepat, termasuk pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital.

Dalam menghadapi berbagai kendala ini, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki sikap resilien dan proaktif. Mereka perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar dan terus mencari cara untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha. Misalnya, mengikuti pelatihan atau seminar tentang manajemen usaha, pemasaran, dan penggunaan teknologi dapat menjadi langkah awal yang baik. Selain itu, menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lain juga dapat membuka peluang baru dan memperluas jaringan bisnis. Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi sangat kompleks, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Desa Padengo yang terletak di Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, merupakan salah satu wilayah yang memiliki tantangan dalam mengatasi tingkat reruntuhan. Meskipun desa ini kaya akan sumber daya alam dan budaya lokal, namun masih terdapat sejumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padengo, Pemerintah Desa beserta berbagai pihak terkait telah meluncurkan program-program UMKM sebagai potensi solusi. Adapun jumlah UMKM yang tercatat per tahun 2022 Provinsi Gorontalo memiliki 94.829 UMKM

dan jumlah pada Kabupaten Pohuwato 11.028 UMKM yang terdiri dari 13 Kecamatan yang salah satunya adalah kecamatan Duhiadaa. Di Desa Padengo sendiri UMKM yang menonjol diwilayah ini adalah UMKM Nasi Kuning dan Pembuatan Roti.

Usaha mikro merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun tergolong jenis usaha marjinal, usaha mikro memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha ini biasanya dijalankan dengan menggunakan teknologi yang relatif sederhana, sehingga memudahkan individu untuk memulai usaha dengan modal yang terjangkau. Misalnya, seorang pedagang kaki lima yang menjual makanan ringan di pinggir jalan. Dengan modal awal yang tidak besar, mereka dapat memulai usaha dan menarik pelanggan dari sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun usaha mikro memiliki keterbatasan, mereka tetap mampu berkontribusi pada ekonomi lokal (Handayati et al., 2021).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh usaha mikro adalah tingkat modal yang rendah. Banyak pelaku usaha mikro, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Ini sering kali disebabkan oleh kurangnya jaminan yang dapat mereka tawarkan, serta ketidapahaman tentang proses pengajuan pinjaman. Sebagai contoh, seorang petani yang ingin mengembangkan usaha pertanian mereka mungkin tidak dapat memperoleh pinjaman untuk membeli benih atau alat pertanian modern. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan tidak dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam akses kredit sangat penting bagi pengembangan usaha mikro.

Selain itu, usaha mikro cenderung berorientasi pada pasar lokal. Mereka sering kali menjual produk yang dihasilkan dari sumber daya lokal atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Misalnya, pengrajin kerajinan tangan di Bali yang memproduksi barang-barang seni untuk wisatawan. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat. Namun, keterbatasan dalam jaringan distribusi dan pemasaran dapat menjadi penghambat bagi usaha mikro untuk mencapai pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan dalam hal pemasaran agar usaha mikro dapat berkembang lebih jauh.

Dalam konteks teknologi, meskipun usaha mikro menggunakan teknologi yang sederhana, ada potensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk manajemen inventaris atau pemasaran digital dapat membantu pelaku usaha mikro menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan demikian, meskipun mereka memulai dengan teknologi yang terbatas, penerapan teknologi yang lebih modern dapat membuka peluang baru. Ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam usaha mikro harus didorong untuk meningkatkan daya saing mereka.

Seperti yang terjadi di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato yang ditemui dilapangan kendala dan permasalahan yang dihadapi disebabkan karena

beberapa UMKM mungkin kesulitan mempertahankan kualitas produk dan layanan mereka, yang dapat mengurangi daya saing mereka di pasar. Hal ini sering terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas sumber daya itu sendiri. Sehingga hal ini memerlukan berbagai upaya dari pemerintah seperti dalam hal pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan efisien maka diperlukan pelatihan dan pendidikan khusus untuk membantu pemilik UMKM. Selain itu juga kemajuan teknologi menjadi masalah jika UMKM tidak memiliki akses atau sumber daya untuk mengadopsi teknologi terbaru. Hal ini dapat membatasi efisiensi operasional mereka.

Dari data yang diperoleh angka kemiskinan di Desa Padengo meningkat setiap tahunnya. Ada 4 dusun di desa padengo yaitu Dusun lantia, Dusun popotohe, Dusun bula dan Dusun tibawa. Pada tahun 2019 ada 321 jiwa kurang mampu di desa padengo, kemudian pada tahun 2020 ada 447 jiwa, Selanjutnya pada tahun 2021 penduduk kurang mampu di Desa Padengo ada 513 jiwa, dilanjutkan pada tahun 2022 ada 600 jiwa kurang mampu di desa padengo, dan pada tahun 2023 meningkat lagi penduduk kurang mampu yang ada di Desa Padengo yaitu ada 765 jiwa.

Sehingga program UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Desa Padengo menjadi relevan karena UMKM memiliki karakteristik yang sesuai dengan konteks desa, yaitu skala usaha yang lebih kecil, penggunaan sumber daya lokal, serta potensi untuk memberdayakan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi program UMKM di Desa Padengo telah berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta dampak yang dihasilkan dalam hal pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Dalam konteks perbandingan dengan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa Desa Padengo memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari daerah lain. Misalnya, penelitian di daerah perkotaan sering kali menunjukkan bahwa akses pasar menjadi tantangan utama, sementara di Desa Padengo, tantangan tersebut lebih kepada pendidikan dan keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam pengimplementasian program UMKM. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat mencapai hasil yang optimal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak bergantung pada analisis statistik atau jenis kuantifikasi lainnya. Menurut (Pasolong, 2012) penelitian kualitatif berdasarkan jenis data yang berbeda mengungkapkan bahwa data kualitatif adalah nilai yang berasal dari perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka statistik. Penelitian dengan fokus deskriptif bertujuan untuk secara akurat menggambarkan seseorang atau kelompok dan karakteristik atau keadaan mereka untuk

mengukur prevalensi suatu masalah atau serangkaian masalah dalam populasi secara luas. *Desk research*, seperti yang didefinisikan oleh (Pasolong, 2012).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari kantor desa Padengo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Waktu penelitian ini diperlukan selama tiga bulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam konteks ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, yang mencakup program berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha kecil. Masing-masing program ini dirancang untuk menjawab tantangan yang berbeda, namun saling terkait dalam menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, misalnya, bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada individu atau keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Salah satu contoh nyata dari program ini adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), di mana keluarga miskin mendapatkan akses ke bahan pangan yang diperlukan melalui kartu elektronik. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat. Dengan bantuan yang tepat, diharapkan keluarga-keluarga ini dapat mengalihkan fokus dari sekadar bertahan hidup menuju upaya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Selanjutnya, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berfokus pada penguatan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui inisiatif seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya perbaikan kualitas hidup mereka. Misalnya, dalam PKH, keluarga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga pendidikan dan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan sosial mereka.

Di sisi lain, program pemberdayaan usaha kecil juga menjadi fokus penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menyadari bahwa sektor

usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Dengan modal yang cukup, mereka dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Contoh nyata dari keberhasilan program ini dapat dilihat pada banyaknya pelaku UKM yang berhasil bertransformasi dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Namun, meskipun berbagai program telah dilaksanakan, tantangan dalam penanggulangan kemiskinan masih tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses distribusi bantuan tidak terhambat oleh praktik korupsi atau birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program-program tersebut, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa bantuan yang ada benar-benar bermanfaat.

Selain itu, perlu ada sinergi yang lebih baik antara berbagai program yang ada. Integrasi antar program akan menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Misalnya, penerima manfaat dari program bantuan sosial dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang ditawarkan dalam program pemberdayaan masyarakat. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menerima bantuan sekali, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mengakses peluang kerja yang lebih baik.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Dengan adanya program-program yang terintegrasi, pemerintah berusaha untuk tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Meskipun tantangan masih ada, seperti isu transparansi dan kebutuhan akan sinergi antar program, langkah-langkah yang diambil saat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan angka kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun, dan masyarakat dapat meraih kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan peraturan yakni Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia, yang mana merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan bukan hanya sekadar upaya untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga merupakan kebijakan dan program pemerintah yang

terintegrasi dan sistematis. Hal ini mencakup kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat itu sendiri.

Salah satu poin utama dalam Perpres ini adalah perlunya pendekatan yang terencana dan bersinergi. Pendekatan ini mengharuskan setiap pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Misalnya, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sementara dunia usaha dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. Sebagai contoh, program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut relevan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan daya saing masyarakat dalam pasar kerja.

Selanjutnya, peraturan ini juga menekankan pentingnya data dan informasi yang akurat dalam merumuskan kebijakan. Tanpa data yang tepat, upaya penanggulangan kemiskinan dapat menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sistem pengumpulan data mengenai kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan baik. Misalnya, program Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap lima tahun dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi ekonomi masyarakat. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif, serta memantau kemajuan dari program-program yang sudah dilaksanakan.

Lebih lanjut, Perpres No. 15 Tahun 2010 juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program-program pemerintah, tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Contohnya, dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masyarakat dapat berperan serta dalam menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi lokal. Dengan melibatkan masyarakat, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Analisis mendalam mengenai dampak dari Perpres ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat jaringan sosial yang ada di masyarakat. Ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja sama, muncul sinergi yang dapat mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Misalnya, komunitas yang memiliki program pertanian berkelanjutan dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan agroindustri untuk meningkatkan produktivitas dan akses pasar. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dan berkomitmen dalam

upaya penanggulangan kemiskinan. Terdapat risiko bahwa beberapa pemangku kepentingan mungkin tidak sepenuhnya memahami peran mereka atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berkontribusi secara maksimal. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang intensif dan memberikan dukungan teknis bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar mereka dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan dengan baik.

Di Desa Padengo kabupaten Pohuwato UMKM juga dijalankan oleh masyarakat, untuk mengukur implementasi dalam program UMKM ini menurut Van Meter dan Van Horn (MRizky, 2020) ada 5 indikator.

1. Standar Dan Ukuran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (MRizky, 2020) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui harus dijalankan dengan efektif agar dapat memberikan dampak yang signifikan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Program sebagai instrumen kebijakan berisi serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga, yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu serta memperoleh alokasi anggaran yang diperlukan. Misalnya, dalam konteks program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah dapat meluncurkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau. Setiap kegiatan ini saling terkait dan berkontribusi pada tujuan keseluruhan dari kebijakan tersebut.

Keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada standar dan ukuran yang ditetapkan untuk menilai efektivitasnya. Misalnya, dalam program pendidikan, indikator keberhasilan dapat mencakup tingkat kelulusan siswa, peningkatan nilai ujian, dan partisipasi orang tua dalam proses pendidikan. Dengan menetapkan ukuran yang jelas, para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Analisis yang mendalam terhadap data dan hasil yang diperoleh juga penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sebagai contoh, jika program pelatihan keterampilan tidak menghasilkan peningkatan pendapatan bagi peserta, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin ada, seperti kurangnya akses ke pasar kerja atau kualitas pelatihan yang tidak memadai.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya,

termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat memperkuat pelaksanaan program dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Misalnya, dalam program kesehatan masyarakat, keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas intervensi yang dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga mengenai tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin lebih efektif.

Transisi yang lancar antara tahap perumusan kebijakan dan implementasi sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi dalam pelaksanaan program. Ketika sebuah kebijakan diimplementasikan, harus ada komunikasi yang jelas dan terbuka antara semua pihak yang terlibat. Hal ini membantu mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Sebagai contoh, jika sebuah kebijakan tentang pengelolaan sampah diterapkan, pemerintah daerah perlu berkomunikasi dengan masyarakat mengenai prosedur dan manfaat dari program tersebut, serta menyediakan pelatihan bagi petugas kebersihan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan program dengan baik.

Implementasi program atau kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik yang memerlukan perhatian dan analisis yang mendalam. Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kemampuan untuk menjalankan program dengan efektif, mengukur hasilnya dengan standar yang jelas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Dengan demikian, kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta komunikasi yang efektif, akan meningkatkan peluang keberhasilan program. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang diterapkan, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada Indikator standar dan ukuran kebijak ini Implementasi program UMKM di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dilihat dari standar dalam hal ini peraturan yang mengatur Program ini belum ada. Sedangkan dilihat dari kebijakan pemerintah desa untuk para pelaku UMKM yaitu membantu para pelaku UMKM mengurus proposal untuk diajukan ke dinas-dinas untuk mendapatkan batuan modal.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan alat yang digunakan dalam menentukan keberhasilan kebijakan dalam pemberdayaan. Dalam konteks ini, sumber daya tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau material, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, penting

untuk memahami bagaimana masing-masing sumber daya ini berperan dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sumber daya manusia, sebagai salah satu komponen utama, memainkan peran kunci dalam keberhasilan kebijakan. Kualitas dan keterampilan individu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sangat menentukan. Misalnya, dalam program pemberdayaan masyarakat, keberadaan tenaga kerja terlatih dan berpengalaman dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. Jika kita mengambil contoh program pelatihan keterampilan, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan instruktur dalam mentransfer pengetahuan serta kemampuan peserta dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, sumber daya finansial juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan kebijakan. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, pelaksanaan kebijakan seringkali terhambat. Sebagai contoh, sebuah proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah terpencil mungkin terhenti jika dana yang diperlukan tidak tersedia. Dalam hal ini, perencanaan anggaran yang cermat dan pengelolaan keuangan yang transparan menjadi sangat penting. Selain itu, pencarian sumber pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga internasional, dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan finansial.

Waktu juga merupakan sumber daya yang tidak kalah penting. Setiap kebijakan memiliki jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika waktu tidak dikelola dengan baik, maka hasil yang diharapkan bisa saja meleset. Contohnya, dalam proyek pengembangan komunitas, jika tahapan pelaksanaan tidak mengikuti jadwal yang telah ditentukan, maka dampak positif yang diharapkan pada masyarakat mungkin tidak tercapai. Oleh karena itu, manajemen waktu yang efektif, termasuk penjadwalan yang realistis dan pengawasan berkala, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.

Ketiga sumber daya ini—manusia, finansial, dan waktu—tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya finansial. Dalam situasi di mana anggaran terbatas, tim yang terampil dapat menemukan cara inovatif untuk menyelesaikan proyek tanpa memerlukan biaya tambahan. Demikian pula, pengelolaan waktu yang baik dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga mengurangi risiko pemborosan dan meningkatkan produktivitas.

Lebih jauh lagi, analisis mendalam terhadap interaksi antara ketiga sumber daya ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara semua elemen tersebut. Dalam konteks ini, pengembangan kebijakan yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua dimensi sumber daya. Misalnya, dalam merancang program pemberdayaan ekonomi,

penting untuk tidak hanya fokus pada pelatihan keterampilan (sumber daya manusia) tetapi juga memastikan bahwa ada cukup dana untuk mendukung proyek tersebut (sumber daya finansial) dan bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan (sumber daya waktu).

Keberhasilan kebijakan dalam pemberdayaan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Ketiga elemen ini harus dipahami dan diintegrasikan secara menyeluruh dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergis ini, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, serta menciptakan keberlanjutan dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk selalu mempertimbangkan interaksi antara berbagai sumber daya dalam setiap keputusan yang diambil, demi mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (Marlina et al., 2021) bahwa : “sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah penting dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan”.

Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia (cipta, rasa, dan karsa) sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa manusia bukan hanya sekadar tenaga kerja, tetapi merupakan elemen penting yang membawa kreativitas, inovasi, dan semangat dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang baik, yang meliputi proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, serta pemeliharaan kesejahteraan karyawan.

Dalam proses rekrutmen, organisasi harus mampu menarik individu-individu yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi informasi yang sedang berkembang memerlukan tenaga ahli dalam bidang pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini, strategi pemasaran yang efektif dan penawaran yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon karyawan. Selain itu, penggunaan platform digital untuk menjangkau lebih banyak calon karyawan juga menjadi hal yang penting dalam era modern ini. Dengan demikian, proses rekrutmen tidak hanya sekadar mencari tenaga kerja, tetapi juga menciptakan citra positif organisasi di mata masyarakat.

Setelah proses rekrutmen, langkah selanjutnya adalah pengembangan karyawan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Misalnya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital dapat mengadakan pelatihan tentang strategi SEO dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan keterampilan tim pemasaran mereka. Program pengembangan ini tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi

organisasi secara keseluruhan, karena semakin terampil karyawan, semakin tinggi pula produktivitas yang dihasilkan.

Selain pelatihan, penting juga untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karir mereka. Hal ini bisa dilakukan melalui promosi atau rotasi jabatan yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang. Misalnya, seorang karyawan yang awalnya bekerja di bagian pemasaran dapat dipromosikan menjadi manajer proyek, yang memungkinkannya untuk mengelola tim dan proyek secara langsung. Dengan memberikan kesempatan untuk berkembang, organisasi tidak hanya meningkatkan loyalitas karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif.

Pemeliharaan kesejahteraan karyawan juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kesejahteraan karyawan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari tunjangan kesehatan, keseimbangan kerja-hidup, hingga program kesejahteraan mental. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan fasilitas olahraga atau program konseling bagi karyawan yang membutuhkan. Dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan.

Selain sumber daya manusia, kita juga perlu memahami konsep sumber daya modal. Sumber daya modal tidak terbatas berupa uang, tetapi dapat pula berupa barang modal, seperti peralatan, mesin-mesin, dan bangunan. Modal dalam definisinya yang paling luas adalah segala sesuatu yang sudah diproduksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa sumber daya modal berfungsi sebagai sarana untuk mendukung operasional organisasi.

Sebagai contoh, sebuah pabrik yang memproduksi barang elektronik memerlukan mesin-mesin canggih untuk memproduksi barang dengan efisiensi tinggi. Investasi dalam teknologi terbaru dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, pemeliharaan yang baik terhadap mesin dan peralatan juga menjadi faktor penting untuk memastikan kelancaran produksi. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya modal yang baik akan berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sumber daya modal juga mencakup aspek finansial. Modal yang tersedia dalam bentuk uang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, pemasaran, atau ekspansi usaha. Dalam hal ini, organisasi perlu memiliki strategi keuangan yang baik agar dapat mengelola sumber daya modal dengan efektif. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan produk baru perlu melakukan analisis pasar dan perencanaan keuangan yang matang agar investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal.

Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya modal merupakan dua aspek yang saling terkait dan sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia sebagai aset utama harus dikelola dengan baik melalui

proses rekrutmen, pengembangan, dan pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Sementara itu, sumber daya modal yang mencakup peralatan, mesin, dan aspek finansial juga harus dikelola secara efektif untuk mendukung operasional dan pertumbuhan organisasi. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, organisasi akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis.

Di Desa Padengo pengembangan sumber daya ini dilakukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti seminar dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar dapat mengembangkan keahlian seperti memproduksi dan memasarkan produk mereka. Sedangkan untuk sumber daya modal pemerintah desa masih terus mencari jalan agar para pelaku UMKM di Desa Padengo mendapatkan modal dari desa untuk pengembangan UMKM. Karena sejauh ini para pelaku UMKM mendapatkan modal hanya dengan pengajuan proposal ke dinas-dinas.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (MRizky, 2020) : “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.”

Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi, ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan, sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (*action*) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya modal dalam mencapai tujuan organisasi.

Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia—cipta, rasa, dan karsa—sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. SDM berfungsi sebagai penggerak utama dalam organisasi, di mana setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pengelolaan SDM yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal. Misalnya, dalam sebuah perusahaan teknologi, seorang programmer yang terampil dapat menghasilkan solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi sangat krusial.

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan perhatian yang serius terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia dan sumber daya modal. SDM yang

terampil dan termotivasi, serta pengelolaan sumber daya modal yang efisien, merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memahami dan mengelola kedua aspek ini secara holistik, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sehingga, melalui implementasi kebijakan yang baik, tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pada Indikator ini pemerintah desa Padengo dalam berbagai kesempatan seperti pada pelaksanaan sosialisasi seminar dan pelatihan mengambil peran dalam mengubah pola pikir para pelaku UMKM agar dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produknya dan mendorong pelaku UMKM dapat berfikir kreatif agar produk yang dihasilkan dapat menarik para konsumen dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Pemerintah desa juga berusaha produk yang dihasilkan UMKM desa Padengo agar mendapatk label halal sehingga dapat dipasarkan secara luas.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Pramono, 2020). Dalam konteks ini, komunikasi organisasi bukan hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi operasional organisasi tersebut.

Selain itu, komunikasi organisasi juga berperan dalam manajemen perubahan. Ketika organisasi menghadapi perubahan, baik itu perubahan struktural, teknologi, atau strategi, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan menerima perubahan tersebut. Misalnya, dalam proses penggabungan dua perusahaan, komunikasi yang jelas dan transparan tentang alasan dan manfaat penggabungan tersebut dapat mengurangi kecemasan dan ketidakpastian di kalangan karyawan.

Komunikasi organisasi adalah elemen vital yang mempengaruhi hampir setiap aspek operasional dan budaya suatu organisasi. Dari pertukaran informasi yang sederhana hingga pengelolaan hubungan antar individu dan tim, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan strategi komunikasi mereka, dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, kolaboratif, dan inovatif.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting bagi pencapaian tujuan keberhasilan bisnis. Dalam konteks ini, komunikasi bisnis tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga mencakup interaksi yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini,

efektivitas komunikasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi. Ketika sebuah bisnis berkembang, tantangan komunikasi yang dihadapi juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku bisnis untuk mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai dengan dinamika yang ada.

Sebagai contoh, perusahaan besar yang memiliki banyak cabang di berbagai lokasi harus memastikan bahwa setiap cabang dapat berkomunikasi dengan baik dengan pusat. Hal ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi komunikasi yang tepat, tetapi juga menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan transparan di seluruh organisasi. Jika komunikasi antar cabang tidak berjalan dengan baik, bisa jadi akan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan.

Sejalan dengan pesatnya perubahan ekonomi dan kegiatan bisnis yang berjalan, pengusaha membutuhkan strategi komunikasi yang tepat untuk menghadapi tantangan yang muncul. Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi, perusahaan yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan karyawan dan pelanggan akan lebih mudah untuk bertahan. Mereka dapat menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah dan memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan baru yang mungkin diterapkan. Ini menciptakan rasa percaya dan loyalitas dari karyawan dan pelanggan, yang sangat penting dalam masa-masa sulit.

Di sisi lain, aktivitas organisasi di Desa Padengo menunjukkan bagaimana komunikasi dapat berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pentingnya komunikasi dalam memasarkan produk mereka. Dalam pelatihan ini, para pelaku usaha diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan, memahami kebutuhan pasar, serta membangun jaringan dengan sesama pengusaha. Dengan demikian, komunikasi menjadi alat yang sangat penting dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk.

Selain itu, peran pemerintah dalam memberikan pelatihan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya sebuah usaha. Dengan adanya pelatihan ini, pelaku usaha di Desa Padengo dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki cara mereka berkomunikasi dan memasarkan produk. Misalnya, penggunaan media sosial sebagai platform pemasaran telah terbukti efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, untuk memanfaatkan media sosial dengan baik, pelaku usaha harus memiliki keterampilan komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan harus mencakup aspek-aspek ini agar para pelaku usaha dapat beradaptasi dengan cepat.

Komunikasi antar pelaku usaha di Desa Padengo juga menjadi fokus perhatian pemerintah desa. Dengan membangun jaringan komunikasi yang solid antar pengusaha, mereka dapat saling bertukar ide dan pengalaman. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antar pengusaha, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan bisnis. Misalnya, seorang pengusaha

yang berhasil dalam memasarkan produk makanan khas daerah dapat berbagi strategi dengan pengusaha lain yang bergerak di bidang yang sama. Dengan cara ini, semua pelaku usaha dapat belajar satu sama lain dan meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antar pelaku usaha. Melalui berbagai kegiatan seperti forum diskusi atau pertemuan rutin, pemerintah desa dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang bermanfaat. Dalam forum tersebut, para pelaku usaha dapat menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, serta mencari solusi bersama. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan yang sangat penting dalam dunia usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas.

Komunikasi adalah elemen kunci dalam mencapai keberhasilan bisnis, baik di tingkat individu, organisasi, maupun komunitas. Dalam konteks Desa Padengo, peran komunikasi sangat jelas terlihat dalam pengembangan UMKM dan upaya pemerintah untuk mendukung pelaku usaha. Dengan membangun jaringan komunikasi yang efektif, pelaku usaha dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan berinovasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan keterampilan komunikasi mereka agar dapat beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terus berubah. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. (Anggreani, 2013)

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada rencana yang baik, tetapi juga pada sumber daya yang tersedia. Sumber daya ekonomi lingkungan mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur yang memadai, akses terhadap modal, hingga dukungan sosial dari masyarakat. Misalnya, di Desa Padengo, keberadaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. UKM tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Sifat opini publik di lingkungan juga merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Opini publik yang positif dapat mendorong dukungan terhadap kebijakan, sedangkan opini negatif dapat menghambat

pelaksanaannya. Di Desa Padengo, jika masyarakat secara umum percaya bahwa kebijakan yang diterapkan akan membawa manfaat bagi mereka, maka dukungan terhadap kebijakan tersebut akan lebih kuat. Sebaliknya, jika ada keraguan atau ketidakpuasan, maka akan sulit bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi yang transparan dan membangun kepercayaan dengan masyarakat.

Dari segi politik, dukungan dari elite politik juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika para pemimpin politik mendukung kebijakan yang dirancang untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk diimplementasikan. Sebaliknya, jika elite politik tidak mendukung, maka kebijakan tersebut berisiko tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam konteks Desa Padengo, dukungan dari anggota dewan lokal dan pejabat pemerintah dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UKM.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan ini memaparkan temuan penelitian yang selaras dengan teori Van Hourt dan Van Meter. Teori ini menekankan pentingnya variabel sumber daya dalam proses implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, variabel sumber daya yang menonjol dari lima variabel yang digunakan menunjukkan bahwa tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan dapat diimplementasikan dengan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi para pelaku UKM, serta membangun kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Desa Padengo sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk sumber daya ekonomi lingkungan, dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik para partisipan, opini publik, dan dukungan elite politik. Semua elemen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga penting untuk mengelola hubungan ini dengan baik. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program UMKM di Desa Padengo, Kabupaten Pohuwato, masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan keberhasilan program tersebut. Salah satu temuan utama adalah bahwa standar dan ukuran kebijakan yang mengatur program ini belum sepenuhnya ada, yang menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku UMKM. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta dalam mengakses bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah desa telah

mengambil langkah-langkah positif dengan membantu pelaku UMKM dalam mengurus proposal untuk mendapatkan bantuan modal dari dinas-dinas terkait. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor UMKM, yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian lokal. Namun, tanpa adanya dukungan yang lebih terstruktur dan regulasi yang jelas, upaya ini mungkin tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan yang signifikan. Sumber daya manusia dan modal adalah dua faktor penting yang menjadi penopang bagi keberhasilan UMKM. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan sangat penting untuk menjalankan usaha dengan baik. Oleh karena itu, penanaman pengetahuan kepada pelaku usaha menjadi krusial. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa harus dirancang dengan baik agar dapat memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Misalnya, pelatihan tentang manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih siap menghadapi tantangan pasar. Ketersediaan modal juga menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Modal yang cukup akan memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses modal bagi pelaku UMKM. Selain itu, program-program yang memberikan insentif bagi investor untuk berinvestasi di sektor UMKM juga perlu dipertimbangkan. Karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini pemerintah desa, berperan penting dalam mengubah pola pikir pelaku UMKM. Melalui sosialisasi, seminar, dan pelatihan, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan diri pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka. Misalnya, dengan mengadakan pameran produk lokal, pelaku UMKM dapat mendapatkan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan konsumen dan mendapatkan umpan balik yang berharga. Selain itu, dorongan untuk berpikir kreatif dalam menciptakan produk yang menarik juga harus terus didorong agar pelaku UMKM dapat bersaing dengan produk dari daerah lain. Aktivitas organisasi di Desa Padengo yang lebih fokus pada pelatihan dan pengembangan usaha menunjukkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Namun, perluasan kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga harus mencakup pengembangan jaringan pemasaran yang lebih luas. Pemerintah desa dapat memfasilitasi kolaborasi antara pelaku UMKM dengan pihak-pihak lain, seperti distributor, pengecer, dan platform e-commerce, untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Dalam hal komunikasi, pemerintah desa perlu mendorong pelaku usaha untuk lebih aktif dalam membangun komunikasi antar sesama pengusaha. Komunikasi yang baik dapat menciptakan jejaring yang saling mendukung, di mana pelaku UMKM dapat berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya. Misalnya, mengadakan forum diskusi rutin atau kelompok kerja dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kolaborasi antar pelaku usaha. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memainkan peran penting dalam keberhasilan program UMKM. Kegiatan usaha harus sejalan dengan adat istiadat masyarakat

setempat agar dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan pelaku UMKM tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga akan berdampak positif pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas cakupan penelitian agar mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM di daerah lain, serta membandingkan strategi yang diterapkan di Desa Padengo dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan implementasi program UMKM secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beatrice, C., & Hertati, D. (2023). Model Pentahelix dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Manggarsari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 107–123. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i2.6261>
- Handayati, P., Wafaretta, V., Fauzan, S., & ... (2021). Peningkatan Wawasan Dan Kemampuan Pelaku Umkm Dalam Pemanfaatan Dana Pkbl Perusahaan. *Sinergi: Jurnal ...*, 3, 20–23.
- Marlina, E., Dawud, J., & Budiarti, A. (2021). Implementasi Kebijakan Kelas Ibu Hamil sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu di Kota Cimahi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.31113/jmat.v2i1.5>
- Melati, R., Blanco, Y. O., Firdausy, N., Maharani, A. D. U., Kandias, M. H., & Billah, M. (2022). Pengembangan UMKM Melalui Digitalisais Di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Karya*, 2(3), 68–76. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- MRizky, A. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Pasolong. (2012). *Pasolong*.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Pratama, I., Suria, O., Chandra, A. Y., & Prasetyaningrum, P. T. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Perkembangan UMKM (Nyong Group). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 269–274. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.991>
- Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Sujatmiko, B., Indraswari, N., Anggaeni, T. T., & Wismandanu, O. (2022). Pelatihan Pemasaran Daring “Digital Marketing” Pada Pelaku Umkm Di Desa

- Pangadegan, Kabupaten Sumedang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 608. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.37332>
- Tibyan. (2010). *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sragen Tesis TIBYAN*.
- Yuwinanto, H. P. (2020). Pelatihan keterampilan dan upaya pengembangan UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(1), 79. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i1.2018.79-87>
- Zhahirah, A., Wibowo, Septiani Putri Ramadhani, A., Randa, P. M. R., & Panorama, M. (2023). Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30352–30356.